

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting dalam pembentukan sumber daya manusia. Sumber daya akan dibentuk setelah proses pendidikan. Yuniarti dan Sukarniati (2021) dalam (Wardani et al., 2025) berpendapat bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah untuk mendukung dan mendorong kualitas pendidikan harus terus direalisasikan dengan efektif. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Wardani et al., 2025). Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memecahkan rantai kemiskinan antar generasi, pendidikan dianggap sangat penting. Namun, kenyataan sosial Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar, terutama di daerah pedesaan dan di antara masyarakat miskin. Karena masalah seperti biaya yang tinggi, kurangnya perlengkapan, dan kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, masih banyak anak usia sekolah yang menghadapi kesulitan untuk pergi ke sekolah secara rutin.

Kemiskinan di Indonesia adalah masalah sosial yang senantiasa dikaji secara terus menerus. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, sebagai negara sedang berkembang dengan populasi yang terus meningkat, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia masih di bawah rata-rata negara maju. Orang yang memiliki pendapatan rendah memiliki kualitas hidup yang buruk karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendapatkan berbagai layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Indeks pembangunan manusia Indonesia rendah karena kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan, dan perawatan kesehatan yang terjamin. Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap

pendidikan anak. Tingkat kemiskinan biasanya diukur dengan tingkat pendapatan (Syahriani 2016 dalam (Rusmiyati, 2018).

Kemiskinan relatif, di sisi lain, didefinisikan sebagai keadaan di mana sebuah kelompok masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang sudah di atas garis kemiskinan (Rukmana & Citra, 2022). Setiap warga negara seharusnya memiliki akses terhadap kebutuhan dasar namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi standar kebutuhan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar keterbatasan ekonomi, melainkan hambatan struktural yang menghalangi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program Keluarga Harapan dimaksudkan untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama pendidikan dan kesehatan. Dengan mewajibkan anak-anak penerima manfaat untuk bersekolah, program ini diharapkan dapat menghentikan rantai kemiskinan dengan memberi mereka akses lebih baik ke pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang dimulai pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan terus berlanjut selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Aturan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Salah satu jenis program perlindungan sosial non-kontributif, Program Keluarga Harapan, dapat meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja melalui berbagai mekanisme yang berkorelasi.

Anak-anak dapat melanjutkan sekolah karena ada Program Keluarga Harapan (PKH), terutama di sektor pendidikan. Dengan itu, anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu akan lebih mudah mendapatkan pendidikan sebagai penerima manfaat PKH di bidang pendidikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak PKH akan berbeda-beda di berbagai tempat dan kondisi Nazara dan

Rahayu et al., (2013) dalam (Martsha, 2024). Menurut analisis dampak PKH yang dilakukan oleh World Bank (2010) dalam (Martsha, 2024), dampak PKH lebih besar di daerah perkotaan, di mana ada lebih banyak fasilitas pendidikan. Sebaliknya, rumah tangga yang bukan peserta PKH memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga di wilayah non-PKH (Martsha, 2024). Selain fasilitas pendidikan, akses ke informasi seperti telepon dan internet juga harus diperhatikan untuk mendorong siswa usia sekolah untuk belajar. Penggunaan internet dalam pendidikan dapat mendorong sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan aplikasi IPTEK. Aplikasi ini membantu siswa menjadi lebih teredukasi dan memungkinkan lulusan sekolah memenuhi standar kompetensi di tempat kerja (Vianti et al., 2023).

Pendidikan dan kesehatan memiliki peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Kedua sektor ini merupakan bentuk investasi strategis negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penerus bangsa. Menurut Tumanggor (2010), proses pembangunan seharusnya memperkuat peran keluarga sebagai institusi sosial utama yang berfungsi menjaga ketahanan sosial masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial. Melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga penerima manfaat didorong untuk memperoleh dan memanfaatkan layanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, pangan, serta layanan perawatan dan pendampingan sosial (Rusmiyati, 2018).

Secara umum, Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pemenuhan pendidikan anak dari keluarga prasejahtera di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) yang mencatat bahwa tingkat partisipasi sekolah anak usia 7–12 tahun mencapai 99,24%, sedangkan anak usia 13–15 tahun mencapai 95,08%. Peningkatan ini tidak terlepas dari intervensi program bantuan sosial seperti PKH yang menetapkan kewajiban bagi keluarga penerima manfaat untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah.

Berdasarkan data pemerintah Desa Cilampunghilir, Kampung Borolong tahun 2025, terdapat 420 kepala keluarga (KK), di mana sebanyak 82 KK merupakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, jumlah tersebut belum mencerminkan seluruh keluarga miskin yang ada, sehingga masih terdapat keluarga yang belum terjangkau oleh program. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kampung Borolong masih cukup tinggi, dan cakupan program PKH belum sepenuhnya menjangkau seluruh keluarga yang membutuhkan. Secara ideal, PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan bantuan bersyarat agar anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi positif dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, khususnya dalam penyediaan perlengkapan sekolah dan layanan pendidikan lainnya. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani, seperti penggunaan bantuan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan dan perbedaan antara tingkat kesadaran individu dan pentingnya pendidikan.

Selain itu, penelitian lain cenderung lebih fokus pada indikator kuantitatif, seperti tingkat partisipasi sekolah, sementara penelitian tentang penggunaan bantuan secara langsung dalam konteks kehidupan keluarga masih sangat terbatas. Karena itu, penting untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak program Keluarga Harapan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak di Kampung Borolong, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka dapat dirumuskan masalah adalah Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH)

pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di Kampung Borolong Desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang?

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemaknaan atau istilah-istilah yang ada dalam pembahasan penelitian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1.3.1 Dampak

Dampak adalah perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak pada keluarga penerima manfaat. Dalam penelitian ini, dampak dimaknai sebagai perubahan yang dapat dirasakan, diamati, dan dijelaskan oleh informan, baik keluarga penerima manfaat, pendamping PKH, maupun pihak sekolah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi sekolah, keberlanjutan pendidikan, serta kedisiplinan anak dalam mengikuti kegiatan belajar.

1.3.2 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam penelitian ini, Program Keluarga Harapan dipahami sebagai bentuk bantuan yang diterima keluarga dengan kewajiban tertentu, seperti memastikan anak tetap bersekolah, yang pelaksanaannya didukung oleh peran pendamping dalam melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap keluarga penerima manfaat.

1.3.3 Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak

Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak adalah kondisi terpenuhinya hak anak dalam memperoleh layanan Pendidikan secara layak, baik dari segi akses, keberlangsungan maupun dukungan dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, pemenuhan kebutuhan Pendidikan anak diartikan sebagai kemampuan pemenuhan pendidikan dilihat dari kemampuan anak dalam mengikuti pendidikan formal secara teratur, didukung oleh ketersediaan kebutuhan belajar, kehadiran di sekolah, serta keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka kegunaan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dampak Program Keluarga Harapan Pada Pemenuhan Pendidikan Anak di Kampung Borolong Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pendidikan masyarakat dan kajian pembangunan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pemenuhan pendidikan anak.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai Pelajaran untuk Memberikan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian lapangan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa, khususnya terkait dampaknya pada pemenuhan pendidikan anak.
- b. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagai refleksi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan anak adalah investasi jangka panjang yang harus didukung tidak hanya dari bantuan pemerintah, tetapi juga dari usaha mandiri keluarga.
- c. Bagi Pemerintah Desa, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar tidak hanya menciptakan ketergantungan, tetapi juga menumbuhkan kemandirian keluarga penerima manfaat.
- d. Bagi tenaga pendidik, agar dapat memahami kondisi sosial-ekonomi siswa penerima PKH dan memberikan dukungan yang lebih tepat terhadap keberlangsungan pendidikan mereka.